

**DAFTAR ISIAN**  
**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: SANUR  
Kecamatan: DENPASAR SELATAN  
Kota: KOTA DENPASAR  
Provinsi: BALI  
Bulan: 9  
Tahun: 2020

Nama Pengisi: YULIA MIFTAHUL AZIZAH  
Pekerjaan: STAFF  
Jabatan: STAFF

Kepala Desa / Lurah: IDA BAGUS RAKA JISNU, S.Ag  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : DARI DATA KEPENDUDUKAN  
Referensi 2: DARI DATA KEPALA LINGKUNGAN  
Referensi 3: DARI DATA PEMERINTAH KELURAHAN SANUR  
Referensi 4: DARI DATA DINAS INSTANSI TERKAIT

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**A. Jumlah Penduduk**

| Jumlah                     | Jenis Kelamin |            |
|----------------------------|---------------|------------|
|                            | Laki-laki     | Perempuan  |
| Jumlah penduduk tahun ini  | 4757 orang    | 4335 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 4785 orang    | 4370 orang |
| Persentase perkembangan    | -0.59 %       | -0.8 %     |

**B. Jumlah Keluarga**

| Jumlah                            | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini  | 1841 KK      | 0 KK         | 1841 KK      |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 1851 KK      | 0 KK         | 1851 KK      |
| Prosentase Perkembangan           | -0.54 %      | %            |              |

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

**A. Pengangguran**

|  |            |
|--|------------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)                     | 5600 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 1000 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga        | 150 orang  |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh                   | 2269 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu             | 120 orang  |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja         | 0 orang    |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja               | 0 orang    |

**B. Kesejahteraan Keluarga**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera     | 0 keluarga    |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1      | 12 keluarga   |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2      | 41 keluarga   |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3      | 1400 keluarga |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 394 keluarga  |
| 6. Total jumlah kepala keluarga     | 1847 keluarga |

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

**A. SUBSEKTOR PERTANIAN**

| Tanaman      | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Bawang Merah | 0                  | 0                       | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0                  |

**B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN**

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Cengkeh | 0                  | 0                       | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0                  |

**C. SUBSEKTOR PETERNAKAN**

| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg | Nilai Bahan Penolong yg | Jumlah Ternak |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|

|  |  |  |                |                |        |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|
|  |  |  | digunakan (Rp) | digunakan (Rp) | (Ekor) |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|

**D. SUBSEKTOR PERIKANAN**

| Jenis Produksi   | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| Tongkol/cakalang | 1                          | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Tenggiri         | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Cumi             | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Gurita           | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Kerapu/Sunuk     | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Nener            | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Kerang           | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Kepiting         | 0.5                        | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |
| Tuna             | 1                          | 0                   | 0                                  | 0                                      | 0                                       | 0                     |

**E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN**

|  |          |
|--|----------|
| Total nilai produksi tahun ini                       | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan            | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                   | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis  |

**F. SUBSEKTOR KERAJINAN**

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |
| Total jenis kerajinan rumah tangga        | 6 jenis  |

**G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN****G.1. Subsektor Industri Pakaian**

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada  | 2 jenis  |

**G.2. Subsektor Industri Pangan**

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada  | 6 jenis  |

**H. SUBSEKTOR KEHUTANAN**

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |

**I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN****I.1. Subsektor Perdagangan Besar**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Total nilai transaksi                 | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar  | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya            | Rp. 0,00 |

**I.2. Subsektor Perdagangan Eceran**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Jumlah total jenis perdagangan eceran | 0 jenis  |
| Total nilai transaksi                 | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan eceran   | Rp. 0,00 |

**I.3. Subsektor Hotel**

|   |         |
|---|---------|
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 7 jenis |
|---|---------|

|   |           |
|---|-----------|
| Jumlah total pendapatan   | Rp. 0,00  |
| Jumlah total biaya pemeliharaan   | Rp. 0,00  |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan  | Rp. 0,00  |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh  | Rp. 0,00  |
| <b>I.4. Subsektor Restoran</b>  |           |
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi   | 77 Unit   |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan   | Rp. 0,00  |
| Biaya antara lainnya  | Rp. 0,00  |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh  | Rp. 0,00  |
| <b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>  |           |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini  | 0 unit    |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan   | Rp. 0,00  |
| Total nilai bangunan yang ada   | Rp. 0,00  |
| Biaya antara lainnya  | Rp. 0,00  |
| <b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>  |           |
| <b>K.1. Subsektor Bank</b>  |           |
| Jumlah transaksi perbankan  | Rp. 0,00  |
| Jumlah nilai transaksi perbankan  | Rp. 0,00  |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00  |
| <b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>   |           |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank  | 18 Unit   |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank  | 0 Jenis   |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank   | Rp. 0,00  |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00  |
| <b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>   |           |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah   | 87 unit   |
| Total nilai persewaan yang dicapai  | Rp. 0,00  |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00  |
| Biaya lainnya   | Rp. 0,00  |
| <b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>   |           |
| Jumlah perusahaan jasa  | 123 Jenis |
| Nilai transaksi perusahaan jasa   | Rp. 0,00  |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00  |
| Biaya lainnya   | Rp. 0,00  |
| <b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>  |           |
| <b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>  |           |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat  | 3 unit    |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat  | Rp. 0,00  |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan  | Rp. 0,00  |
| <b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>   |           |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat   | 14 jenis  |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial   | Rp. 0,00  |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00  |
| <b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>   |           |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi  | 7 jenis   |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi   | Rp. 0,00  |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp. 0,00  |
| <b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>  |           |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga  | 4 jenis   |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga   | Rp 0,00   |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga  | Rp 0,00   |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00   |
| <b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>  |           |
| <b>M.1. Subsektor Angkutan</b>  |           |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 2 Jenis   |
| Jumlah total kendaraan angkutan   | 16 Unit   |

|  |         |
|--|---------|
| Nilai total transaksi pengangkutan                               | Rp 0,00 |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan                               | Rp 0,00 |
| <b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>                    |         |
| <b>N.1. Subsektor Listrik</b>                                    |         |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 0 Jenis |
| Jumlah nilai produksi listrik                                    | Rp 0,00 |
| Jumlah total nilai transaksi                                     | Rp 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                             | Rp 0,00 |
| <b>N.2. Subsektor Gas</b>  |         |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas                                   | 0 jenis |
| Nilai aset produksi gas  | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi  | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp 0,00 |
| <b>N.3. Subsektor Air Minum</b>                                  |         |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum        | 0 jenis |
| Nilai aset penyediaan air minum                                  | Rp 0,00 |
| Nilai produksi air minum   | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi air minum  | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp 0,00 |

**IV. PENDAPATAN PERKAPITA****A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>A.1. Kerajinan</b>   |                 |
| 1. Jumlah rumah tangga  | 2 Keluarga      |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga  | 0 orang         |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani   | 0 Keluarga      |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh  | 0 orang         |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 5.000.000,00 |
| <b>A.2. Jasa dan perdagangan</b>  |                 |
| 1. Jumlah rumah tangga  | 1467 Keluarga   |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga  | 5690 orang      |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani   | 1650 Keluarga   |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh  | 1348 orang      |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 3.000.000,00 |

**B. PENDAPATAN RILL KELUARGA**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Jumlah Kepala Keluarga                               | 1847 KK         |
| Jumlah Anggota Keluarga                              | 9139 orang      |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga                    | Rp 2.500.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 7.000.000,00 |

**V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>1. Sektor Pertanian</b>     |       |
| Petani                         | orang |
| Buruh Tani                     | orang |
| Pemilik Usaha Tani             | orang |
| <b>2. Sektor Perkebunan</b>    |       |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan | orang |
| Buruh perkebunan               | orang |
| Pemilik usaha Perkebunan       | orang |
| <b>3. Sektor Peternakan</b>    |       |
| Peternakan Perorangan          | orang |
| Buruh Usaha Peternakan         | orang |
| Pemilik Usaha Peternakan       | orang |
| <b>4. Sektor Perikanan</b>     |       |
| Nelayan                        | orang |
| Buruh Usaha Perikanan          | orang |
| Pemilik Usaha Perikanan        | orang |

|  |         |
|--|---------|
| <b>5. Sektor Kehutanan</b>                                   |         |
| Pengumpul Hasil Hutan  | orang   |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan                           | orang   |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan                         | orang   |
| <b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>             |         |
| Penambang Galian C Perorangan                                | orang   |
| Buruh Usaha Pertambangan                                     | orang   |
| Pemilik Usaha Pertambangan                                   | orang   |
| <b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b> |         |
| <b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>                 |         |
| <b>9. Sektor Perdagangan</b>                                 |         |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi                              | 0 orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi                                 | 0 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi                             | 0 orang |
| <b>10. Sektor Jasa</b>                                       |         |

**VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT**

|  |            |
|--|------------|
| <b>A. ASET TANAH</b>   |            |
| Tidak memiliki tanah   | 17 orang   |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha   | 20 orang   |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha  | 40 orang   |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha  | 150 orang  |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha  | 259 orang  |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha  | 273 orang  |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha  | 325 orang  |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha  | 732 orang  |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha  | 65 orang   |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha  | 15 orang   |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha   | 0 orang    |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha  | 0 orang    |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha  | 0 orang    |
| Jumlah total penduduk  | 0 orang    |
| <b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>  |            |
| <b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>   |            |
| Memiliki penggilingan padi   | orang      |
| Memiliki traktor   | orang      |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian   | orang      |
| Memiliki kapal penangkap ikan  | orang      |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan   | orang      |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan  | orang      |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan  | orang      |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan   | orang      |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan   | orang      |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata   | orang      |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan                            | orang      |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | orang      |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas                                     | orang      |
| <b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>   |            |
| Tembok   | 1736 rumah |
| <b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>  |            |
| Keramik  | 1731 rumah |
| Semen  | 5 rumah    |
| <b>RUMAH MENURUT ATAP</b>  |            |
| Genteng  | 1732 rumah |
| Seng   | 1 rumah    |
| Daun lontar/gebang/enau  | 1 rumah    |

**VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA**

**VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT****A. Tingkat Pendidikan Penduduk**

|  |            |
|--|------------|
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin                            | 0 orang    |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 320 orang  |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental                        | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat                                   | 886 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat                                    | 773 orang  |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat                              | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat                                 | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat                                  | 866 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat                                 | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat                            | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat                                  | 4162 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-1  | 91 orang   |
| Jumlah penduduk sedang D-2   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-2  | 106 orang  |
| Jumlah penduduk sedang D-3   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-3  | 182 orang  |
| Jumlah penduduk sedang S-1   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat S-1  | 768 orang  |
| Jumlah penduduk sedang S-2   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat S-2  | 53 orang   |
| Jumlah penduduk tamat S-3  | 9 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB A   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB A  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB B   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB B  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB C   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB C  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental                                 | 0 orang    |

**B. Wajib belajar 9 tahun**

|   |            |
|---|------------|
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun                    | 1322 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 1322 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 0 orang    |

**C. Rasio Guru dan Murid**

|  |          |
|--|----------|
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak  | 5 orang  |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 41 orang |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat              | 25 orang |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat             | 25 orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat            | 55 orang |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat           | 50 orang |
| 7. Jumlah guru SLTA/ sederajat               | 0 orang  |
| 8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat              | 0 orang  |
| 9. Jumlah siswa SLB                          | 0 orang  |
| 10. Jumlah guru SLB                          | 0 orang  |

**D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat**

|   |            |
|---|------------|
| Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan             | 1 unit     |
| Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan             | 2 unit     |
| Jumlah perpustakaan keliling                    | 0 unit     |
| Jumlah sanggar belajar                          | 9 unit     |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 6 kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A                 | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A                    | 0 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket B                 | 0 kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B                    | 0 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket C                 | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C                    | 0 orang    |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan              | 4 unit     |
| Jumlah peserta kursus keterampilan              | 4 orang    |

**IX. KESEHATAN MASYARAKAT****A. Kualitas Ibu Hamil**

|  |          |
|--|----------|
| Jumlah ibu hamil                           | 17 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu       | 0 orang  |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas      | 10 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit    | 0 orang  |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 7 orang  |

|   |                |
|---|----------------|
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek   | 0 orang        |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih  | 0 orang        |
| Jumlah kematian ibu hamil   | 0 orang        |
| Jumlah ibu hamil melahirkan   | 63 orang       |
| Jumlah ibu nifas  | 63 orang       |
| Jumlah kematian ibu nifas   | 0 orang        |
| Jumlah ibu nifas hidup  | 0 orang        |
| <b>B. Kualitas Bayi</b>   |                |
| Jumlah keguguran kandungan  | 0 orang        |
| Jumlah bayi lahir   | 63 orang       |
| Jumlah bayi lahir mati  | 0 orang        |
| Jumlah bayi lahir hidup   | 63 orang       |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan   | 0 orang        |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan  | 0 orang        |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg  | 0 orang        |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang        |
| <b>C. Kualitas Persalinan</b>   |                |
| <b>Tempat Persalinan</b>  |                |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum  | 0 unit         |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin  | 0 unit         |
| Tempat persalinan Puskesmas   | 1 unit         |
| Tempat persalinan Polindes  | 0 unit         |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak  | 0 unit         |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan   | 0 unit         |
| Tempat praktek dokter   | 0 unit         |
| Rumah dukun   | 0 unit         |
| Rumah sendiri   | 0 unit         |
| <b>Pertolongan Persalinan</b>   |                |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter   | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong bidan  | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong perawat  | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin   | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga   | 0 tindakan     |
| <b>D. Cakupan Imunisasi</b>   |                |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan  | 63 orang       |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1                             | 63 orang       |
| Jumlah bayi usia 3 bulan  | 63 orang       |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2                              | 63 orang       |
| Jumlah bayi usia 4 bulan  | 63 orang       |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3                              | 63 orang       |
| Jumlah bayi 9 bulan   | 63 orang       |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak   | 63 orang       |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar  | 63 orang       |
| <b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>                                 |                |
| <b>Pasangan Usia Subur</b>  |                |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun  | 434 orang      |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun   | 1.632 orang    |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun                                | 0 orang        |
| Jumlah pasangan usia subur  | 1.124 pasangan |
| <b>Keluarga Berencana</b>   |                |
| Jumlah akseptor KB  | 5.949 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik   | 1.300 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral   | 1.700 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom   | 1.000 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil  | 1.200 orang    |
| Jumlah pengguna metode vasektomi  | 0 orang        |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi                                      | 0 orang        |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah                                     | 400 orang      |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional  | 0 orang        |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx                                       | 349 orang      |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB                                       | 0 orang        |
| <b>F. Wabah Penyakit</b>  |                |
| <b>Demam berdarah</b>   |                |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini   | 0 kejadian     |
| Jumlah yang meninggal   | 0 kejadian     |

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| <b>G. Angka Harapan Hidup</b>  |                         |                    |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan                                    | 74,00 Tahun             |                    |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota                                    | 74,00 Tahun             |                    |
| Angka Harapan Hidup Provinsi   | 0,00 Tahun              |                    |
| Angka harapan Hidup Nasional   | 0,00 Tahun              |                    |
| <b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>                               |                         |                    |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali                                      | 47 Keluarga             |                    |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM   | 400 Keluarga            |                    |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan                             | 0 Keluarga              |                    |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa                                     | 1.400 Keluarga          |                    |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran                              | 0 Keluarga              |                    |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum                                     | 0 Keluarga              |                    |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai                                      | 0 Keluarga              |                    |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung  | 0 Keluarga              |                    |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air                                   | 0 Keluarga              |                    |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut       | 0 Keluarga              |                    |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga              |                    |
| Total jumlah keluarga  | 0 Keluarga              |                    |
| <b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>                                      |                         |                    |
| Kebiasaan buang air besar  |                         |                    |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat   | 1.847 Keluarga          |                    |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan             | 0 Keluarga              |                    |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan              | 0 Keluarga              |                    |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum                            | 0 Keluarga              |                    |
| <b>Pola makan</b>  |                         |                    |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali                                     | Tidak                   |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali   | Tidak                   |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali   | Ada                     |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali                              | Ada                     |                    |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali                                  | Tidak                   |                    |
| <b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>  |                         |                    |
| Dukun Terlatih   | Tidak ada               |                    |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu                       | Banyak                  |                    |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif                              | Tidak ada               |                    |
| Paranormal   | Tidak ada               |                    |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri   | Tidak ada               |                    |
| Tidak diobati  | Tidak ada               |                    |
| <b>J. Status Gizi Balita</b>   |                         |                    |
| Jumlah Balita  | 538 orang               |                    |
| Jumlah Balita bergizi buruk  | 0 orang                 |                    |
| Jumlah Balita bergizi baik   | 538 orang               |                    |
| Jumlah Balita bergizi kurang   | 0 orang                 |                    |
| Jumlah Balita bergizi lebih  | 0 orang                 |                    |
| <b>K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini</b>                                     |                         |                    |
| <b>Jenis penyakit</b>  | <b>Jumlah penderita</b> | <b>Di rawat di</b> |
| ISPA   | 50 orang                | Rumah              |
| <b>L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat</b>               |                         |                    |
| Jumlah MCK Umum  | 0 unit                  |                    |
| Jumlah Posyandu  | 9 unit                  |                    |
| Jumlah kader Posyandu aktif  | 90 orang                |                    |
| Jumlah pembina Posyandu  | 10 orang                |                    |
| Jumlah Dasawisma   | 117 Dasawisma           |                    |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif   | 351 orang               |                    |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif  | 35 orang                |                    |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif                               | 1 orang                 |                    |
| Buku rencana kegiatan Posyandu   | Diisi                   |                    |
| Buku data pengunjung Posyandu  | Diisi                   |                    |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu   | Diisi                   |                    |
| Buku administrasi Posyandu lainnya   | 6 jenis                 |                    |
| Jumlah kegiatan Posyandu   | 5 jenis                 |                    |
| Jumlah kader kesehatan lainnya   | 0 orang                 |                    |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis  | 1 jenis                 |                    |



|   |         |
|---|---------|
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 3 jenis |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan          | 1 jenis |
| Lainnya   | 0 jenis |
|   |         |

## X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

### A. Konflik SARA

|   |         |
|---|---------|
| Kasus konflik pada tahun ini  | 2 kasus |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga   | 1 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW  | 1 kasus |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli  | 2 kasus |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah  | 0 kasus |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah   | 0 orang |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan  | 0 orang |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan   | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | 0 orang |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik   | 0 kasus |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                              | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                        | Rp 0,00 |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 buah  |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 rumah |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara  | 0 orang |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara   | 0 orang |
| Jumlah janda akibat konflik Sara  | 0 orang |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara   | 0 orang |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang |

### B. Perkelahian

|   |         |
|---|---------|
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini                 | 2 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa                | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah                 | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material          | 0 kasus |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

### C. Pencurian

|  |         |
|--|---------|
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini                      | 3 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api                              | 0 kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                      | 0 orang |

### D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

|   |         |
|---|---------|
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat                            | 2 kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 1 kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | 1 kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum   | 1 orang |

### E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

|  |          |
|--|----------|
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi            | 20 orang |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini             | 1 orang  |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan                 | 0 orang  |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | 3 orang  |

### F. Pemakaian Miras dan Narkoba

|   |           |
|---|-----------|
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras                     | 2 buah    |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras                       | 150 orang |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras                               | 10 kasus  |
| Jumlah pengedar Narkoba                                       | 0 orang   |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba                     | 0 orang   |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba                       | 1 kasus   |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba                          | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum   | 1 orang   |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum | 1 orang   |

### G. Prostitusi

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat | 0 orang |
| Lokalisasi prostitusi                | Ada     |

|  |          |
|--|----------|
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | 6 buah   |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi  | 2 kasus  |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi   | 4 kali   |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi   | 12 kali  |
| <b>H. Pembunuhan</b>   |          |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini   | 2 orang  |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat   | 1 kasus  |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat  | 1 kasus  |
| Jumlah kasus bunuh diri  | 1 kasus  |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum  | 5 kasus  |
| <b>I. Penculikan</b>   |          |
| Jumlah kasus penculikan  | 0 kasus  |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat   | 0 kasus  |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat  | 0 kasus  |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum   | 0 kasus  |
| <b>J. Kejahatan seksual</b>  |          |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini  | 0 kasus  |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini   | 0 kasus  |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara  | 3 kasus  |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat  | 2 kasus  |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks  | 25 unit  |
| <b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   |          |
| Jumlah gelandangan   | 0 orang  |
| Jumlah pengemis jalanan  | 0 orang  |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar  | 0 orang  |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar   | 6 orang  |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental  | 2 orang  |
| Jumlah orang cacat fisik   | 12 orang |
| Jumlah orang kelainan kulit  | 0 orang  |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan   | 0 orang  |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh   | 0 unit   |
| Jumlah panti jompo   | 0 unit   |
| Jumlah panti asuhan anak   | 0 unit   |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan  | 0 unit   |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota   | 0 orang  |
| Jumlah penghuni bantaran sungai  | 0 orang  |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api   | 0 orang  |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya   | 0 orang  |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif                         | 0 orang  |
| Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun  | 0 orang  |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun   | 0 orang  |
| Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun   | 0 orang  |
| Jumlah janda   | 6 orang  |
| Jumlah duda  | 45 orang |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran   | 0 orang  |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat  | 0 orang  |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat   | 0 orang  |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat   | 0 orang  |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang   | 0 orang  |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga  | 6 orang  |
| Jumlah penduduk eks NAPI   | 2 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir   | 50 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi   | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan   | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih   | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus  | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh  | 0 orang  |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk   | 0 orang  |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman  | 0 orang  |
| <b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>   |          |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri  | 0 kasus  |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami  | 0 kasus  |

|   |            |
|---|------------|
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya  | 0 kasus    |
| <b>M. Teror dan Intimidasi</b>  |            |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan                   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan                   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat                                 | 0 kasus    |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | 0 kasus    |
| <b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>  |            |
| Organisasi Siskamling   | Ada        |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat   | Ada        |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda  | 9 RT       |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas  | 31 orang   |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda  | Ada        |
| Buku anggota Hansip dan Linmas  | 5 jenis    |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta   | 0 unit     |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah   | 1 kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan  | 1 Pos      |

**XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT****A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara**

|   |            |
|---|------------|
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara   | 4 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara  | 2 kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika  | 2 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika   | 2 kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya   | 0 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya  | 2 kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri  | 0 kasus    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi  | 0 orang    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi   | 0 orang    |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan  | 0 kasus    |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini   | 0 kasus    |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan   | 0 kasus    |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara  | 0 kasus    |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.                     | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya  | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain  | 0 kasus    |

**B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi**

|  |             |
|--|-------------|
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan | 4 jenis     |
| Jumlah Wajib Pajak   | 10000 orang |
| Target PBB   | Rp 0,00     |
| Realisasi PBB  | 0,00 %      |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB                                     | 3 tindakan  |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan  | 0 jenis     |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan        | 0 orang     |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan              | Rp 0,00     |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan           | 0,00 %      |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan                             | 0 jenis     |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan                               | Rp 0,00     |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan                                 | 0,00 %      |
| Jumlah kasus pungutan liar   | 0 kasus     |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar                                    | 0 kasus     |

**C. Partisipasi Politik**

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>   |  |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih  | 9100 orang   |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu  | 7000 orang   |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik   | 2 orang  |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini  | 6 partai   |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini  | 1 partai   |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan   | 30 orang   |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu   | 4 orang  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil   | 7000 pemilih   |
| <b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>  |  |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih   | 7000 orang   |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu  | 0 pemilih  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu  | 0 pemilih  |
| <b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>   |  |
| Penentuan Jabatan Kepala Desa  | Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas   |
| Penentuan Sekretaris Desa  | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota   |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun   | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat  |
| Masa jabatan Kepala Desa   | 0 tahun  |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan   | Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari Bupati/Walikota   |
| <b>4. Pemilihan BPD</b>  |  |
| Jumlah anggota BPD   | 0 orang  |
| Penentuan anggota BPD  |  |
| Pimpinan BPD   |  |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD   |  |
| Anggaran untuk BPD   |  |
| Produk keputusan BPD tahun ini   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa 0 buah</li> <li>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali</li> <li>3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah</li> <li>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali</li> <li>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali</li> <li>6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali</li> <li>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali</li> </ol> |
| <b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>  |  |
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan  | Ada  |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD   | Keputusan Kepala Desa  |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 12 unit organisasi   |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK   | Keputusan Lurah  |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan   | 0 unit organisasi  |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK   | Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah   |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya        | Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah   |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK   | Aktif  |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  | 5 kegiatan   |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  | Aktif  |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  | 5 kegiatan   |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK   | Ada  |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya   | Ada  |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK   | Ada  |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD  | Memadai  |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK   | 5,00 %   |

|   |                |
|---|----------------|
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK | Ada dan terisi |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK   | Berfungsi      |
|   |                |

### C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

#### 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

|   |              |
|---|--------------|
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan  | 6 kali       |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan  | 75,00 %      |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan   | 50,00 %      |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan   | 25,00 %      |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan   | 6,00 %       |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif  | Ya           |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan   | Ya           |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif  | Ya           |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan   | 26,00 %      |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa   | 6,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan     | 6,00 %       |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel   | 20 kegiatan  |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)   | Ada          |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)  | Ada          |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada          |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi  | 0 . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang  | 0 . kegiatan |

#### 2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

|   |            |
|---|------------|
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang   | 85,00 %    |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota  | 40,00 %    |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa  | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah   | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang   | 6,00 %     |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan   | 6,00 %     |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan  | 6,00 %     |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat | 6,00 %     |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada  | Ada        |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.   | Ada        |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah                                       | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum  | 0 kasus    |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan   | 0 Jenis    |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan  | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota   | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi   | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN   | 0 kegiatan |

#### 3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

|  |         |
|--|---------|
| Jumlah kelompok arisan   | 9 buah  |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh   | 0 orang |
| Ada tidaknya dana sehat  | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah   | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah  | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus                      | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha   | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun  | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya                         | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan                          | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian  | Ada     |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan  | Ada     |

|   |               |
|---|---------------|
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi  | Ada           |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya   | Ada           |
| <b>4. Adat Istiadat</b>   |               |
| Adat istiadat dalam perkawinan  | Aktif         |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak  | Aktif         |
| Adat istiadat dalam upacara kematian  | Aktif         |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan   | Tidak         |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian   | Tidak         |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai   | Tidak         |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga  | Aktif         |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam   | Aktif         |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya  | Aktif         |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar  | Aktif         |
| <b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>   |               |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan   | 1 jenis       |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar   | 0 jenis       |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah  | 1             |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah   | 1             |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal   | 0             |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga   | 0 jenis       |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga   | 0 jenis       |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga   | 0 jenis       |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecah kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.  | 0 kasus       |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya  | 0 kasus       |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus       |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus       |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan | 0             |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan   | 1             |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat   | 0             |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatif masyarakat sendiri  | 1             |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain  | 0             |
| <b>Etos Kerja Penduduk</b>  |               |
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas   | 1             |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi  | 0             |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan  | 0             |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan   | 0             |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain   | 0             |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain   | 0             |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota   | 1             |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya  | 1             |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak   | 1             |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan                              | 0             |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen   | 0             |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu  | 0             |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah  | 0             |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan   | 1             |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan   | 2             |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya   | 0             |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat                       | 0             |
| <b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>  |               |
| <b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>   |               |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK  | Tidak         |
| Jumlah kegiatan   | Jenis         |
| <b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>   |               |
| <b>1. Posyandu</b>  |               |
| Kepengurusan  | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi   | 1             |
| Jumlah kegiatan   | 2 Jenis       |
| <b>2. Kelompok Tani/Nelayan</b>   |               |
| Kepengurusan  | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi   | 1             |

|  |               |
|--|---------------|
| Jumlah kegiatan  | 4 Jenis       |
| <b>3. Kelompok Gotong Royong</b>   | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi  | 9             |
| Jumlah kegiatan  | 9 Jenis       |
| <b>4. LKMD/LPM/Sebutan Lain</b>  | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi  | 1             |
| Jumlah kegiatan  | 8 Jenis       |
| <b>5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>                              | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi  | 5             |
| Jumlah kegiatan  | 5 Jenis       |
| <b>6. Karang Taruna</b>  | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi  | 5             |
| Jumlah kegiatan  | 5 Jenis       |
| <b>7. Lembaga Adat</b>   | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan   | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi  | 1             |
| Jumlah kegiatan  | 2 Jenis       |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa                                  |               |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan                             |               |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan |               |

### XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

|  |            |
|--|------------|
| <b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>  |            |
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini  | Rp 0,00    |
| Sumber Anggaran  |            |
| APBD Kabupaten/Kota  | Rp 0,00    |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Rp 0,00    |
| Bantuan Pemerintah Provinsi  | Rp 0,00    |
| Bantuan Pemerintah Pusat   | Rp 0,00    |
| Pendapatan Asli Desa   | Rp 0,00    |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Rp 0,00    |
| Alokasi Dana Desa  | Rp 0,00    |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan   | Rp 0,00    |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat  | Rp 0,00    |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan  | Rp 0,00    |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai  | Rp 0,00    |
| <b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>   |            |
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD   | 0          |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 3 jenis    |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa   | 1          |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota  | 1          |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat   | 4 jenis    |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah                   | 3 kasus    |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah                         | 3 kasus    |
| <b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>   |            |
| <b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>  |            |
| Gedung Kantor  | Ada - Baik |
| Jumlah ruang kerja   | 3 Ruang    |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya  | Ada        |
| Listrik  | Ada        |
| Air bersih   | Ada        |
| Telepon  | Ada        |
| <b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>   |            |

|   |                |
|---|----------------|
| Jumlah mesin tik  | 3 buah         |
| Jumlah meja   | 21 buah        |
| Jumlah kursi  | 97 buah        |
| Jumlah almari arsip   | 4 buah         |
| Komputer  | 4 unit         |
| Mesin fax   | 1 unit         |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa   | 3 unit         |
| <b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>   |                |
| Buku Data Peraturan Desa  |                |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah  |                |
| Buku Administrasi Kependudukan  |                |
| Buku Data Inventaris  |                |
| Buku Data Aparat  |                |
| Buku Data Tanah Kas Desa  |                |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi   |                |
| Buku Data Tanah   |                |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat   |                |
| Buku Agenda Ekspedisi   |                |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan  |                |
| Buku Data Induk Penduduk  |                |
| Buku Data Mutasi Penduduk   |                |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan  |                |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk  |                |
| Buku Data Penduduk Sementara  |                |
| Buku Anggaran Penerimaan  |                |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan   |                |
| Buku Kas Umum   |                |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan  |                |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan   |                |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan  | Ada dan Terisi |
| <b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>   |                |
| Gedung Kantor   |                |
| Jumlah ruang kerja  | Ruang          |
| Balai BPD   | -              |
| Listrik   |                |
| Air bersih  |                |
| Telepon   |                |
| <b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>  |                |
| Jumlah mesin tik  | buah           |
| Jumlah meja   | buah           |
| Jumlah kursi  | buah           |
| Jumlah almari arsip   | buah           |
| Komputer  | unit           |
| Mesin fax   | unit           |
| <b>2.B. Administrasi BPD</b>  |                |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD   |                |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan  |                |
| Buku kegiatan BPD   |                |
| Buku himpunan peraturan desa  |                |
| Buku Lainnya  |                |
| <b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>  |                |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan  | 1              |
| Alat tulis kantor   | 1              |
| Barang inventaris   | 1 Jenis        |
| Buku administrasi   | 5 Jenis        |
| Jenis kegiatan  | 1 Jenis        |
| Jumlah pengurus   | 9 Orang        |
| Jumlah ruang kerja  | Ruang          |
| <b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>  |                |
| <b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>   |                |
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan                                 | Ada            |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan    | Ada            |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah   | Ada            |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD | Ada            |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-            | Ada            |



|   |            |
|---|------------|
| masing  |            |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  | 3 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan  | 2 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan   | 2 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 3 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan   | 2 kali     |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 kali     |
| <b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>  |            |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan  | 1          |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi  | 1          |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 1          |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan laporan bagi kepala desa dan lurah   | 1          |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi  | 0 kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan   | 0 jenis    |
| <b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>  |            |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa   | 1 jenis    |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa  | 1 jenis    |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa  | 1 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.   | 1 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan   | 1 jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 1 jenis    |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa  | 1 jenis    |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan laporan bagi kepala desa dan lurah   | 1 jenis    |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota  | 1 jenis    |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD   | 0 jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 0 jenis    |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan   | 0 jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 kasus    |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  | 0 kasus    |
| <b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>  |            |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  | 1 kali     |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan  | 1 kali     |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan   | 1 kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa   | 1 kali     |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan   | 1 kali     |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan   | 1 kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan  | 1 kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum   | 0 kali     |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan  | 0 kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  | 0 kali     |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga  | 0 kali     |

|   |        |
|---|--------|
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 0 kali |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan   | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya  | 0 kali |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.  | 0 kali |
|   |        |

KOTA DENPASAR, 30 September 2020  
SANUR  
Kecamatan DENPASAR SELATAN  
Kota KOTA DENPASAR

IDA BAGUS RAKA JISNU, S.Ag  
Lurah

Tembusan :

1. Camat DENPASAR SELATAN
2. Walikota KOTA DENPASAR
3. Arsip